

Dasar-Dasar Historis Pendidikan Di Indonesia

Dinda Enjel Hardika Aprelia¹, Binti Maunah²

¹²Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung
e-mail: dindaenjel04@gmail.com, uun.lilanur@gmail.com

Riwayat artikel: submit: 02 Juni 2023; revisi: 21 Juni 2023, diterima: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia sudah ada pada zaman dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengaruh kepercayaan Hindu dan Budha, pengaruh masa Islam dan pendidikan pada masa kemerdekaan. Tujuan penelitian ini membahas tentang dasar historis Pendidikan di Indonesia dari zaman agama islam sampai pada zaman orde baru tentang bagaimana perkembangannya dan kendala Pendidikan di Indonesia pada zaman tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun yang elektronik) serta sumber-sumber data dan/atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan empat langkah analisis literatur, yaitu pengumpulan data, reduksi/penyaringan data, klasifikasi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dari satu zaman ke zaman lain memiliki perkembangan dan pengaruh yang berbeda satu sama lain (2) Tujuan pendidikan pada zaman Portugis adalah untuk menyebarkan agama Katolik (3) Pada masa Kerajaan dan agama Islam, tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia bertakwa kepada Allah (4) kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Belanda dimulai dengan penyebaran agama dan jepang dimulai dengan berdirinya pondok pesantren dan madrasah (5) pada era pergerakan nasional pendidikan dimasukkan dalam program perjuangan (6) Pendidikan pada masa orde lama dimulai dengan Pasal 30 UUD RI Tahun 1950 (7) Pada masa Orde Baru, pemerintah dapat membuat kebijakan Pendidikan (8) pada masa reformasi terjadi perubahan kurikulum Pendidikan untuk siswa.

Kata kunci: dasar historis; Pendidikan; sistem; kebijakan.

ABSTRACT

Education in Indonesia existed in ancient times, then continued with the influence of Hindu and Buddhist beliefs, the influence of the Islamic era and education during the independence period. The aim of this research is to discuss the historical basis of education in Indonesia from the Islamic era to the New Order era, regarding how it developed and the obstacles to education in Indonesia during that era. This research uses a library method by collecting or exploring several journals, books and documents (both printed and electronic) as well as other sources of data and/or information that are considered relevant to the research. Data were analyzed using four steps of literature analysis, namely data collection, data reduction/filtering, data classification and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded as follows: (1) Education from one era to another has different developments and influences from each other (2) The aim of education during the Portuguese era was to spread the Catholic religion (3) During the Kingdom and the Islamic religion, the aim of education is to make people fear Allah (4) educational policy during the Dutch colonial period began with the spread of religion and Japan began with the establishment of Islamic boarding schools and madrasas (5) in the era of the national movement education was included in the struggle program (6) Education during the Order era long ago starting with Article 30 of the 1950 Constitution of the Republic of Indonesia (7). During the New Order period, the government could make education policies. (8) During the reform period there were changes to the education curriculum for students.

Keywords : Historical base; education; system; policy.



Copyright © 2023 The Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan dengan kepustakaan dimana bersumber dari jurnal-jurnal, buku, koran dan sumber lainnya. Penelitian ini fokus pada sejarah Pendidikan pada masa islam sampai pada masa reformasi dimana banyak kendala dan perubahan menuju kemajuan pada dunia Pendidikan. Kepentingan penelitian ini untuk menjelaskan dan mempublikasikan sejarah Pendidikan pada masa islam sampai reformasi dimana kurikulum-kurikulum Pendidikan berubah-ubah pada masa itu. Pada jurnal penelitian ini penulis mendukung sumber-sumber yang diambil oleh penulis untuk memenuhi kebutuhan jurnal penelitian ini.

Pengertian awal Sejarah adalah keadaan masa lalu dengan *segala* macam peristiwa, kejadian yang dilatar belakangi hal-hal tertentu. Ceritanya mencakup segala sesuatu di dunia ini, termasuk hal-hal yang dikembangkan melalui budidaya manusia. Sejarah penuh dengan informasi yang mencakup konsep, teori, praktik moral, cita-cita, bentuk, dll. Pengetahuan tentang masa lalu ini, terutama yang bersifat budaya, biasanya mencakup konsep, praktik, dan hasil yang dicapai. Landasan sejarah adalah asumsi pedagogis yang muncul konsep dan praktik pendidikan (sejarah) sebelumnya sebagai titik awal pengembangan pendidikan saat ini dan yang akan datang (Handito & Stiawan, 2023). Contoh: Motto "tut wuri handayani" sebagai salah satu peran yang harus dipenuhi guru, dan digunakan sebagai semboyan dalam logo Dinas Pendidikan, yaitu Semboyan Ki Hadjar Dewantara (Pendiri Perguruan Tinggi Nasional Taman Siswa) 3 Juli 1922 di Yogyakarta) yang diterima sampai sekarang karena dianggap berharga. Hal-hal di atas merupakan warisan yang tak ternilai dalam tindakan para pemuda generasi sebelumnya, dan generasi muda banyak belajar dari informasi yang terkandung dalam cerita tersebut. Belajar dengan menggunakan ilmu sejarah guna untuk mencoba memajukan diri di masa yang akan datang. Dalam budaya ini, belajar bukan hanya penerimaan dan kelangsungan hidup, tetapi berfungsi sebagai dasar dan bahan pembanding demi kemajuan di masa depan (Meinarno et al., 2024).

Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum berdirinya negara Indonesia. Karena cerita pendidikan di Indonesia sudah ada sejak lama. Pendidikan di Indonesia sudah ada pada zaman dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengaruh kepercayaan Hindu dan Budha, pengaruh masa Islam dan pendidikan pada masa kemerdekaan. Dulu ketika bangsa Indonesia masih berada di puncak kemerdekaan, setidaknya ada tiga orang pendidik yang berjuang melalui pendidikan sekaligus menjadi pejuang kemerdekaan (Saputra, 2021). Mereka merawat anak-anak dan remaja melalui institusi mereka sendiri untuk mengembalikan rasa percaya diri dan harga diri mereka yang hilang akibat penjajahan Belanda. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, cerita masa lampau pendidikan di Indonesia juga lumayan panjang. Pendidikan sudah terdapat sejak zaman dahulu, selanjutnya dilanjutkan dengan pengaruh ajaran Hindu dan Budha, pengaruh Islam, pendidikan dari zaman penjajahan sampai kemerdekaan, orde lama, orde baru dan reformasi. Gejolak semangat itu terwujud dalam bidang pendidikan, yang dipimpin oleh Budi Utomo berjuang melalui budaya, serikat pekerja melalui bisnis, organisasi kepemudaan melalui organisasi sosial, dan partai berjuang melalui partai politik yang menginspirasi lahirnya sekolah (Yusuf Perdana & Rinaldo, 2022). Institusi pendidikan ini juga berjuang dengan pendidikan. Sejarah Pendidikan atau perjuangan dunia Pendidikan dimulai dari masa islam sampai masa reformasi.

METODE

Metode yang dipakai dalam pembuatan jurnal ini adalah kepustakaan Mengumpulkan dan/atau meneliti berbagai jurnal, buku dan dokumen (baik cetak maupun elektronik) dan sumber informasi dan/atau informasi lain yang relevan dengan penelitian ini. Kajian dilakukan pada bulan April 2023.

Data analisis menggunakan empat tahapan analisis yaitu analisis kepustakaan, yaitu pengumpulan data, reduksi/penyaringan data, klarifikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan pada zaman agama Islam

Pada saat tiga kerajaan besar Islam (Ottoman, Safawi dan Mughal) dilemahkan oleh berbagai invasi, kekuatan militer dan politik umat Islam mulai menurun. Barat mengontrol dan memonopoli kekuatan komersial, ekonomi dan militer; Sains Islam, pada masa kejayaannya, mengalami stagnasi, dan lahir lembaga-lembaga sesat dan takhayul; Fatalisme semakin menyebar, membuat dunia Islam semakin terbelakang dan stagnan. Hingga Islam menderita hasil penindasan barat. Kondisi ini membuka mata para pemimpin umat muslim akan “penyakit” para muslim dalam segala aspek kehidupannya, diantaranya itu agama, politik, budaya, ekonomi dan lain-lain. pemimpin Islam ini mendirikan "Gerakan Reformasi Islam". Mereka memusatkan perhatian pada gagasan bahwa kemajuan Islam harus dimulai dengan penyucian imannya. Aqidah murni merupakan titik tolak munculnya etos kerja, semangat juang dan kemandirian individu. Gagasan ini dikemukakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran lain untuk membawa kemajuan dalam Islam diawali dengan keberanian berpikir rasional melalui apa yang disebut ijtihad. Menutup pintu ijtihad membuat umat Islam terdiam. Pemikiran ini diusung oleh Al-Tahtawi, Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Lebih lanjut, ada pemikiran gerbang masuk kejayaan Islam terdapat di upaya pembaharuan pendidikan Islam. Ide tersebut ditemukan di benak Rashid Ridha dan Muhammad Abduh

Pendidikan pada masa kerajaan islam

Pada pertama perkembangan muslim, pendidikan menjadi prioritas utama bagi masyarakat muslim di Indonesia. Islamisasi digunakan untuk mengajarkan Islam dengan cara yang apa adanya. Bahan pendidikan orang muslim guna orang muslim Indonesia menerima dan mengubah lembaga keagamaan dan sosial menjadi lembaga pendidikan dan keislaman di Indonesia. Di Jawa, orang muslim mengutuk agama Hindu ke agama Buddha sebagai basrasama. Surau yang diambil alih oleh umat Islam Minangkabau ini merupakan warisan tradisional orang setempat sebagai lembaga pendidikan Islam dan di Aceh Meunasah dipindahkan ke sekolah Islam. Nusantara memiliki Islamisasi dan pendidikan Islam yang sangat pesat yang berhasil membentuk masyarakat Islami yang mendorong munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa kerajaan muslim pada masa prakolonial adalah: Pertama, Kerajaan Perlak, Kerajaan Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Siak. di Sumatera. Kedua, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Jawa. Ketiga, kerajaan kembar Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan.

Kerajaan Perlak

Kerajaan Islam ke 1 di Indonesia Kerajaan Islam Perlak yang berdiri pada tahun ke-3 abad ke-9 Masehi. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama yang aktif mengamalkan pengajian dan pendidikan Islam. Informasi tentang diadakannya pengajian Islam memang masih beredar, namun diyakini pengajian tersebut akan diadakan di masjid keraton untuk keluarga besar, masjid, rumah dan masyarakat umum. Materi ajar pendidikan Islam terbagi terbagi 2 tingkatan, yaitu tingkatan dasar pertama yang terdiri dari pengajaran membaca, menulis, bahasa Arab, membaca Al-Qur'an dan mengamalkan ibadah. Kedua adalah tingkatan yang lebih tinggi dengan materi Fiqh, Tasawuf, Kalam, dll. Raja ke 6 berasma Sultan Mahdum Alauddin Muhammad Amin yang dikenal menjadi Sultan bijaksana dan saleh. Ia adalah sosok pemuka agama yang menegakan sekolah tinggi muslim. Sidang taklim berlangsung riuh yang dihadiri oleh para santri, khususnya yang taat beragama. Pemerintah juga mengajarkan dan membaca buku-buku agama yang sangat jahil seperti al-Umm yang ditulis oleh Imam Syafii.

Kerajaan Pasai

Kesultanan Pasai muncul di awal hingga ditengah tahun ke-13 akibat Islamisasi wilayah pesisir sering dikunjungi oleh beberapa penjual Muslim sejak tahun ke-7. Sejarahwan umumnya percaya bahwa penegak kesultanan ini merupakan Sultan Malik al-Saleh. Di Kerajaan Pasai pada tahun 1345 Masehi. Menurut kesaksian Ibnu Batutah yang singgah dalam perjalanannya keliling alam semesta, hal ini diambil inti bahwasanya sistem pengajaran yang digunakan di kesultanan Pasai adalah sebagai berikut: Ajaran & bahan ajar agama berasal dari mazhab Syafi'i; teknik pendidikan bersifat informal dalam bentuk pertemuan taklim dan halachic; seorang tokoh pemerintah yang juga seorang peneliti; Biaya pendidikan berasal dari Negara Darussalam, Kerajaan Aceh, yang mberitahukab perang kepada buta huruf & kebodohan pada tanggal 12 Zulkaida 1916 H (1511 M). Sultan Aceh menyukai ilmu dan ulama. Hal tersebut searah melalui wahyu pertama yang menyuruh manusia guna membaca & mencari ilmu. Mungkin kemudian menjadi acuan penghilangan buta huruf. Ajaran Tuhan & ilmu yang mendalam tentang agama yang dianutnya menjadi pertimbangan saat itu, tidak peduli dari mana negaranya & kebangsaannya. Tempat ilmu yang menjadi sentralnya merupakan muslim di Kerajaan Aceh adalah: Balai Seutia Hukama, sebuah tempat penelitian, dimana bertemunya para ilmuwan, pemikir & intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga dimana bergerak di bidang pendidikan disebut Balai Jamaah Ikatan para pemuka agama, yang merupakan segerombolan belajar pemuka agama berdiskusi tentang topik pendidikan. Jenjang dan struktur pendidikan juga diatur dengan cara yang sama seperti sekolah formal saat ini. Tingkat pendidikan tersebut adalah: (a) madrasah terletak di desa & berfungsi sebagai sekolah dasar. Pelajaran yang diberikan adalah menulis dan membaca huruf arab, ilmu agama, melayu, akhlak dan sejarah islam; (b) Rangkang, tingkat sekolah-Tsanawiyah. Tingkat pelatihan ini dipertahankan di setiap kabupaten. Mata pelajarannya adalah bahasa Arab, geografi, sejarah, akuntansi, moralitas, dll.; (c) Dayah berada satu tingkat dengan Madrasah Aliyah di wilayah Ulubalang. Kadang-kadang perlu mengajar di masjid, pelajaran tentang keilmuan bahasa Arab, fikih, tauhid, tasawuf, pedologi, sejarah & tata negara, ilmu resep dan farid; (d) Dayah Teuku Cik diibaratkan sebuah universitas. Tingkatan ini mengajarkan ilmu fikih, tafsir, Hadits, tauhid, bahasa & sastra Arab, sejarah & pemerintahan, logika, astronomi & filsafat.

Kerajaan Siak

Muslim yang ke-1 masuk ke Siak (Riau) sekitar tahun 12 Masehi. Pernyataan tersebut terlihat pada sisa-sisa makam muslim Nizamuddin al-Kamil, seorang laksamana dari Dinasti Fatimiyah dimana wafat pada tahun 1128 M. Pembelajaran ilmu berkembang sangat pesat di kesultanan Siak di era pemerintahan Sultan Syarif Kasim II. Dia adalah karakter yang sangat baik. Pada kepengurusan beliau mendirikan lembaga pendidikan seperti: LIA pada tanggal 15 September 1915 guna seluruh penduduk Kesultanan Siak, pada 1917 menegakan lembaga agama Islam, Madrasah Taufiqiah Al-Hasyimah, Madrasah Annisa' (khusus wanita), mendirikan madrasah untuk cewek-cewek. sekolah dan asrama.

Kerajaan Demak

Kesultanan Demak bertahan sekitar setengah dari 1 abad, sekitar tahun 1500 dan 1550. pimpinan pertama mereka merupakan Raden Fatah. Pada awalnya, Raden Fatah seorang mahasiswa dan muslim di Traffic Light Denta. Setelah lulus, ia menegakan keluarga petani Gangga di Arum. Bayangkara Islah didirikan di sana untuk mendukung Pendidikan dan Pengajaran Islam. Proses pendidikan muslim di Kesultanan Demak berjalan seiring dengan penyebaran muslim dimana dilaksanakan para wali yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Traffic Light, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Mengemban tugas ilmu muslim bagi masyarakat, Wali mempergunakan tempat ibadah muslim sebagai tempat muslim. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di pulau Jawa dan merupakan sentral & symbol kesultanan. Masjid Agung Demak tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah tetapi juga merupakan sentral ilmu muslim. Selain di Masjid Agung, pendidikan agama juga diselenggarakan di

masjid-masjid umum. Tempat ibadah ini dikelola langsung oleh Badal yang ditunjuk oleh pemerintah. Badal kemudian bernama Kyai Ageng, dimana bertanggung jawab atas hal yang ditugaskan. Guru pendidikan agama di masjid dibagi untuk masyarakat luas, sedangkan keluarga kesultanan langsung belajar agama Bersama para pengawal bernama Sunan, baik di keraton dan di tempat tinggal berbagai pengawal

Kerajaan Pajang

Pengalihan dari Kesultanan Demak ke Pajang tidak membawa pengaruh sumber materi untuk sistem belajar mengajar muslim

Kerajaan Mataram

Di bab pendidikan, Mataram menerbitkan sejumlah peraturan master khusus, yaitu pada tiap desa harus ada beberapa wadah untuk pengajian AL-Quran. Di tempat itu diajari huruf Hijaiyah, Barazanji & dasar lain contoh Amalan Ibadah, Rukun Iman dan Rukun Islam. Juga para Kesultanan mengimbau berbagai ayah dan ibu dari anak untuk memberitahukan hal ini kepada anak-anak mereka yang berumur 7 tahun untuk mempelajari Quran.

Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan

Kesultanan ke-1 di Sulawesi Selatan merupakan kesultanan kembar Gowa-Tallo di tahun 1605. pimpinannya masuk Islam dan menamakan dirinya I Mallingkang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awwalul Islam. Daeng Manrab yang setelah itu menggantikan Mangnga'rangng I mengucapkan Syahadat & diberi nama Sultan Alauddin. Di Dalam waktu 2 tahun, semua orang menerima Islam. Misionaris yang terlibat dalam penyebaran Islam merupakan Abdul Qadir Kkatib Tunggal, disebut Datok Ribandang, berasal dari Minangkabau. contoh di kerajaan-kerajaan muslim pada umumnya, masjid di Sulawesi Selatan menjadi sentral perkembangan muslim. di tahun pemerintahan Sultan Malikussaid (I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung), raja Gowa ke-15 (1637-1653), setiap negara memiliki masjid dan setiap desa memiliki langgara. Masjid dan taman panjang di sana tidak hanya berfungsi untuk wadah berdoa, tetapi juga sebagai wadah pengajaran agama bagi kaum muda. Guru yang memberikan ilmu mengaji & ilmu-ilmu keislaman lainnya dinamai Anrong gurunta/gurunta.

Pendidikan pada zaman masuknya Portugis

Dari abad ke-16, pedagang Eropa berbondong-bondong ke Asia Tenggara. Untuk Portugis pertama kali mendarat di Asia Tenggara pada tahun 1509 tepatnya di kota kerajaan Malaka, pasukan sampai dari hasil pertempuran salib melawan umat Islam, tetapi juga menang keuntungan besar dari jual beli lada & bumbu-bumbu. Malaka diserang Portugis tahun 1511 & sesudahnya mereka menundukan Malaka dengan hasil akhir merampas lada & bumbu-bumbu. dari kota kerajaan Malaka. Menurut Hall (Riska & Hudaidah, 2021). Pada 1512 Dipimpin oleh De Abreau, Portugis melakukan perjalanan ke Maluku dan sepanjang perjalanan Portugis juga berhenti pada saat tiba di beberapa pelabuhan seperti Aceh, Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Gresik dan terakhir Ternate. Namun, ketika Belanda tiba di Asia Tenggara pada tahun 1596, perdagangan meningkat pesat Portugis segera dipukul mundur dan kemudian Malaka takluk pada Belanda pada tahun 1641 dan Portugis diusir Dari daerah Maluku.

Di than ke-16, sebelum adanya Belanda, Portugis mempunyai rencana mengambil perdagangan Timur-Barat melewati jalur laut ke timur & menguasai kota serta wilayah strategi yang menurut Mudyahardjo (Purba, 2018) merupakan mata rantai dalam rantai bisnis. Di samping mencari kekayaan (emas) dan kehormatan (kemasyhuran) Portugis datang ke Timur (termasuk Indonesia) tujuannya adalah untuk menyebarkan agama, yaitu Katolik (Injil). Para pedagang Portugis bermukim di tempat-tempat penghasil rempah-rempah yang mahal, yaitu di Indonesia bagian timur, dan biasanya didampingi oleh para misionaris. Untuk menyebarkan agama Katolik di Indonesia, para misionaris membuat sistem pendidikan berupa sekolah. Ide tersebut datang dari seorang misionaris bernama Francis Xavier, yang berjasa meletakkan batu pertama Katolik di Indonesia. Pada tahun

1536 Ternate memiliki sekolah yang mengajar dan diajarkan para misionaris/pemuka agama. Juga pada tahun 1536, seorang penguasa Portugis yang menyebut dirinya Antonio Galvano membangun seminari Maluku untuk anak-anak pejabat setempat. Sekolah yang sama juga dibangun di Pulau Solor dan jumlah muridnya 50 orang. Bahasa Latin juga digunakan di sekolah ini, dan belum jelas bahasa apa yang akan menjadi bahasa pengantar sekolah.

Pendidikan pada zaman Belanda

Pada saat itu pengenalan pendidikan tidak mengalami kemajuan signifikan, dan ini dikarenakan oleh memburuknya keadaan antara Portugis dan masyarakat Ternate, selain itu, selalu ada kebutuhan untuk menghadapi & berperang menghadapi Spanyol & Inggris guna peluang Belanda mengambil alih Ternate. Belanda berikutnya membadali Portugis dengan strategi matang guna memasukkan bahasa Belanda dan Melayu di tempat belajar mereka. Setelah Portugal berakhir, sistem pendidikan Indonesia di Nusantara berada di bawah kendali Belanda, namun tetap berbasis agama. Setelah kehadiran Belanda sebagai penguasa politik Nusantara, muncul berbagai kebijakan berupa imperialisme sebagai satu kesatuan dalam segala aktivitas kolonial yang ingin secara serius menguasai daerah jajahannya. Upaya atasannya sekutu guna mengeksploitasi tempat sasaran membutuhkan personel yang terlatih. Di sini peraturan & upaya atasannya sekutu memperluas pengajaran ilmu guna mewujudkan orang siap kerja terampil berupah rendah. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi barat di Hindia Belanda, pemerintah Belanda menyelenggarakan pelatihan bagi penduduk pribumi, yang bertujuan untuk mempromosikan tenaga kerja yang terampil dan cakap dalam bisnis dan bidang lainnya (Stroomberg, 2018).

Pada tahun 1899 orang Belanda Van Deventer menerbitkan artikel "Een Eereshuld". Artikel ini tentang kepedulian para intelektual Belanda atas kemanusiaannya atas nama penduduk Nusantara. Dari artikel ini tumbuh Politik Etis (kebijakan timbal balik) yang diperkenalkan di Nusantara pada tahun 1901, yang didasarkan pada dua kebijakan sebelumnya, yaitu sistem pertanian wajib (1830-1870) dan kebijakan liberal (1870-1900). Politik etis menyebabkan penurunan kesejahteraan pribumi melalui tidak sedikit penyalahan dari rencana Trias penting Van Deventer, dimana mencakup politik etis. Rencana Van Deventer Triassic adalah pendidikan. Pelatihan tersebut merupakan rencana mengesankan untuk penduduk Indonesia. Rencana tersebut dilaksanakan menggunakan ilmu barat. Pemerintah etis fokus pada sektor keilmuan dengan alasan perbaikan sektor pendidikan itu urgen. Hal ini terlihat ketika status priyayi hanya dapat dicapai melalui pewarisan, namun begitu kebijakan etis dilaksanakan, priyayi nonpriyayi dapat mengaksesnya melalui pendidikan tinggi. Tenaga terlatih juga dibutuhkan terutama untuk sektor industri. Kebijakan keilmuan sekutu dimana diterapkan di Indonesia terdiri dari beberapa ciri utama. Hal yang menandai yaitu, gradasi, dualisme, kontrol terpusat, tujuan terbatas, prinsip koordinasi, & tidak adanya rencana pelatihan. Gradualisme merupakan lambatnya sikap atasannya sekutu terhadap pelaksanaan dinamisme pendidikan. Dualisme ialah perbedaan antara pribumi dan Belanda. Pengawasan pusat yang kuat merupakan kegiatan Gubernur Jenderal dalam pengaturan kebijakan pendidikan. Sasaran yang terbatas berarti bahwa sekolah itu sendiri hanya bertujuan untuk menghasilkan karyawan tingkat rendah. Prinsip harmonisasi adalah bahwa Indonesia dan Belanda memiliki kurikulum yang sama. Kurangnya perencanaan studi yang sistematis berarti tidak ada keterkaitan antar sekolah, sehingga menurut Salindri tidak ada kemungkinan untuk melanjutkan sekolah.

Pada tahun 1892, kebijakan pendidikan ditata ulang di Indonesia. Dalam praktiknya, ada pendidikan dasar, yaitu kelas pertama untuk bangsawan yang belajar bahasa Belanda, kelas kedua untuk rakyat jelata yang menggunakan bahasa daerah, dan kelas ketiga untuk sekolah desa. Keinginan pemerintah untuk memperluas pendidikan dengan biaya serendah mungkin kepada rakyat Indonesia untuk kepentingan masyarakat. Pada pendidikan dasar kelas satu dibagi lagi menjadi kelompok HIS, HCS dan ELS. HIS (Hollands Inlandse School) pertama kali didirikan pada tahun 1914, sekolah ini diperuntukkan bagi para bangsawan Indonesia. HCS (Sekolah Tionghoa Belanda) didirikan

pada tahun 1908 untuk orang-orang Timur perantauan, khususnya Tionghoa. ELS (European Lagere School) didirikan pada tahun 1818 untuk orang asing, Eropa, dan penduduk lokal yang berasal dari timur. Masa studi ketiga sekolah tersebut adalah tujuh tahun.

Pendidikan Zaman Jepang

Sistem keilmuan pada masa Jepang dikemukakan sebagai berikut: (a) Pendidikan dasar (Kokumin Gakko/SD). 6 tahun studi. Termasuk SR First School, variasi nama sekolah dasar 3/5 tahun bagi penduduk asli Hindia Belanda; (b) Melanjutkan pendidikan. Ada dua program lainnya yaitu Shoto Chu Gakko (SMA) dengan masa studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (SMA) juga dengan masa studi 3 tahun; (c) Pelatihan kejuruan. Ini terdiri dari sekolah menengah kejuruan untuk pertukangan, perkapalan, pendidikan, teknik dan pertanian, antara lain; (d) Pendidikan Tinggi. (Suwendi, 2004) Sistem pendidikan di atas merupakan tanda kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama dengan berdirinya lembaga pendidikan seperti madrasah dan pondok pesantren di daerah terpencil. Di sisi lain, pemerintah Jepang juga menyelenggarakan kursus sekolah dan pelatihan bagi calon guru. Sekolah untuk calon guru adalah: (a) Sekolah guru tempat Anda belajar selama 2 tahun disebut Sjoootoo Sihan Gakkoo; (b) Sekolah menengah guru 4 tahun bernama Cutoo Sihan Gakkoo; (c) Perguruan tinggi dengan masa studi 6 tahun disebut kootoo Sihan Gakkoo (S. Saifudin & Saepuddin, 2020).

Berdirinya beberapa sekolah pemerintah Jepang terkait dengan bisnis pengenalan ideologi Jepang, misHakko Ichiu (Kebaikan Umum). Sekolah baru menjadi basisnya orang Jepang membangun sesuatu disini Guru dibebani dengan tugas Sebagai pendukung ideologi Hakko. Setiap orang Guru dilatih di pusat magang di Jakarta. Setiap Daerah mengirimkan calon guru dengan keikutsertaan dalam pelatihan Kondisi Penerimaan kepemimpinan Jepang. Ketika Kembali dalam bidang pengajaran yang bersangkutan Mencondongkan ideologi adalah wajib. (Hakko Ichiu) untuk muridnya dan bagi orang-orang di lingkungan mereka sendiri. (Imran, 2018:76) Juga kebijakan Pendidikan Tentara untuk orang Indonesia seperti Heiho/Organisasi Militer dan PETA bahwa Jepang membentuk para Pemuda (Hudaidah & Karwana, 2022). Halo dan PETA menjadi tempat belajar yang diterima oleh seorang prajurit. Jadi tentara Jepang terbiasa pelatihan militer di masa depan menjadi cikal bakal Tentara Republik Indonesia. Dengan ini heiho dalam proses baris berbaris, belajar bagaimana menggunakan senjata pelaksanaan strategi perang belajar gratis bagi siswa Termasuk pemuda Indonesia untuk menerima pelatihan militer.

Kebijakan Kurikulum Pemerintah Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang, beberapa kebijakan di bidang kurikulum dipraktikkan di Jepang, yaitu:

1. Kurikulum Bahasa Indonesia. Jepang melakukan perubahan kurikulum, terutama bahasa pengantar, artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi signifikan. Oleh karena itu, pendidikan bahasa Indonesia masih menjadi mata pelajaran di sekolah dan menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu bahasa Jepang itu pelajaran dan ada kebiasaan orang Jepang yang harus dipelajari (A. Saifudin, 2022).
2. Penghapusan dualistik kurikulum. Jepang menghapuskan semua lembaga pendidikan selama pemerintahan kolonial Belanda. Sistem dualisme yaitu ajaran Barat dan ajaran Bumiputra tidak diberlakukan. Hanya ada satu jenjang sekolah untuk semua lapisan masyarakat, yaitu Sekolah Rakyat, atau Kokumin Gakkoo, dan Sekolah Desa, yang masih digunakan tetapi dengan nama Sekolah Pertama (Hudaidah & Karwana, 2022).
3. Jenjang pendidikan guru pada zaman Jepang menurut tingkatannya adalah sekolah umum enam tahun (termasuk SMP), sekolah menengah tiga tahun (sekolah menengah modern), dan sekolah menengah tiga tahun. (sekarang SMA) (Muthoharoh, 2021).
4. Bantuan dana untuk perbaikan kurikulum. Kurikulum mencakup mata pelajaran pendidikan umum seperti bahasa Indonesia, matematika dan geografi. Pada tahun 1942 bahasa Jepang juga

diajarkan. (Sholeha, 2021). Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang memberikan dukungan dana kepada sekolah-sekolah, pondok pesantren, dan madrasah agar dapat dengan leluasa menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan kurikulum, misalnya. Pengadaan buku teks dan dana untuk pembelian buku dan literatur sebagai sarana utama reformasi kurikulum.

Pendidikan pada masa Orde Lama

Periode 1945-1950

setelah sistem sekolah Indonesia Merdeka berlandaskan satu Jenis sekolah untuk tiga tingkat Pendidikan dilanjutkan pada zaman Jepang. Saat pelajaran direncanakan biasanya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar Sekolah. teks buku yang digunakan adalah hasil terjemahan Dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang telah menjadi perintis sejak zaman dulu Jepang (Masyhudi, 2023). Yang penting sistem pendidikan saat ini 1945-1950 sebagai berikut : **(a) Pendidikan rendah**, Pendidikan Terendah di Indonesia sejak kemerdekaan disebut sekolah umum (SR) lama. Pelatihan ulang 3 sampai 6 Tahun. Tujuan dari SR meningkatkan taraf Pendidikan masa sebelum kemerdekaan juga bisa menjadi harapan yang tinggi bagi yang mau sekolah; **(b) Pendidikan Guru**, Pada tahun 1945-1950 dikenal dengan tiga jenis pendidikan guru (SGB, SGC, SGA). Sebagai berikut : Lembaga pendidikan B (SGB) berdurasi 4 tahun & hasil akhir pendidikan guru adalah sekolah negeri, Sekolah Guru C (SGC) Karena kebutuhan guru SR yang mendesak, maka perlu dibuka sekolah guru yang dapat menghasilkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dua tahun setelah SR, didirikanlah sekolah guru bernama SGC, namun karena terbukti kurang bermanfaat, ditutup kembali dan sebagian sekolah menjadi SGB, dan Sekolah Guru A (SGA) Karena persepsi bahwa kursus guru 4 tahun tidak menjamin kompetensi yang memadai untuk tingkat pelatihan guru, dibukalah SGA yang menawarkan kursus pelatihan pasca sekolah menengah 3 tahun. . Selain itu, siswa kelas III SGB dapat diterima. Mata pelajaran yang diajarkan di SGA sifatnya sama dengan mata pelajaran di SGB, hanya saja penerapannya lebih luas dan mendalam.; **(c) Pendidikan Umum** : (1) sekolah menengah pertama (SMP), seperti pada zaman Jepang, SMP menggunakan rencana tersebut juga pelajaran yang sama. Tetapi dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan tersebut menteri PP&K pada tahun 1946, lalu memiliki distribusi A dan B Kelas II dimulai, jadi kelas itu ada II A, II B, III A dan III B. Pada Bagian A beberapa ilmu juga diberikan dan Matematika. Tapi lebih diberikan pelajaran bahasa praktek administrasi. Di bagian B sebaliknya, ilmu alam diberikan dan Matematika.; (2) sekolah menengah tinggi (SMT), sekolah ini dilaksanakan setelah sekolah menengah pertama dan dilaksanakan sekitar 3 tahun. Dan biasanya hanya berada di kota-kota besar seperti Surabaya. Pembelajarannya masih sangat singkat dan seadanya waktu itu; **(d) Pendidikan Kejuruan**, Pelatihan kejuruan berfokus pada pendidikan bisnis dan pendidikan perempuan: (1) Pendidikan bisnis: Pada awal kemerdekaan, pemerintahan baru mampu membuka sekolah bisnis lama, dan pelatihan berlangsung tiga tahun setelah sekolah dasar. Sekolah kejuruan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau akuntansi; (2) pendidikan perempuan: setelah kemerdekaan dimana pemerintah membuka Sekolah Keterampilan Putri (SKP) dan pada tahun 1947 Sekolah Guru Kecerdasan Putri (SGKP) yang masa studinya empat tahun setelah SMP atau SKP (Rifa'i, 2016:138-139); **(e) Pendidikan Teknik** : (1) Kursus kejuruan negara (KKN). Sekolah/kursus ini berlangsung selama satu tahun dan merupakan pendidikan teknis terendah berdasarkan SR enam tahun. KKN terdiri dari jurusan: kayu, besi, rotan, furniture, las dan batu; (2) Sekolah Teknik Pertama (STP). Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengrajin yang berkualitas, tetapi dengan pengetahuan teori. Lama studi menurut SR adalah dua tahun; (3) Sekolah Teknik (ST). Tujuannya adalah untuk melatih pengelola lokasi. Durasi pelatihan adalah dua tahun menurut STP atau SMP Bagian B dan mencakup bidang utama konstruksi bangunan, teknik hidrolis dan konstruksi jalan, teknik radio, galangan kapal, percetakan dan pertambangan; (4) Institut Teknik (STM). Tujuannya adalah untuk melatih para ahli teknis dan pejabat teknis tingkat menengah. Pelatihan berlangsung empat tahun setelah tingkat

menengah B atau ST dan terdiri dari mata pelajaran utama konstruksi rumah, teknik sipil, pembuatan kapal, teknik mesin, teknik mesin, teknik elektro, teknologi mesin kelautan, kimia dan konstruksi pesawat terbang; (5) pelatihan guru di lembaga pendidikan teknis. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan guru teknik; **(f) Pendidikan Tinggi**, Pada tahun 1945-1950, warga mendapat kesempatan guna melanjutkan pendidikan tinggi tanpa syarat. Lembaga ini berkembang pesat. Namun, karena pelaksanaannya dilakukan melalui pertempuran fisik, belajar dilakukan dengan waktu yang sedikit. Institusi pendidikan saat ini adalah Universitas Gajah Mada dan beberapa sekolah menengah dan akademi di Jakarta (kawasan perumahan), Klaten, Solo dan Yogyakarta; **(g) Pendidikan tinggi republic**: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mendirikan Republik Sekolah Tinggi pada tanggal 17 Februari 1946 di Yogyakarta; (2) Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada pendiriannya tanggal 3 Maret 1946 oleh Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra Yogyakarta; (3) Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi didirikan pada bulan Februari 1946 di Malang; (4) Fakultas Kedokteran II didirikan pada tanggal 4 Maret 1946 di Solo; (5) Universitas Kedokteran I didirikan pada tanggal 5 Maret 1946 di Klaten; (6) Fakultas Ilmu Pertanian dan Farmasi didirikan di Klaten pada tanggal 27 September. Semuanya di bawah No. 4, 5 dan 6 berada di bawah Pusat Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Klaten; (7) Kementerian Kesejahteraan Republik Indonesia mendirikan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor pada bulan November 1946. Namun, ketika Belanda melancarkan serangan militer pertamanya pada bulan Juli 1947, universitas tersebut dipindahkan ke Klaten. Begitu juga universitas-universitas di Malang; (8) Universitas Gadjah Mada didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1949 dan terdiri dari enam fakultas.

Periode 1950-1966

Pada periode ini pendidikan indoktrinasi dimulai, yaitu. pendidikan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan orde lama. Pada masa orde lama, ujian negara diselenggarakan secara terpusat di bawah sistem kolonial yang ketat namun tetap adil dan berkualitas. Ini dibantu oleh sejumlah kecil sekolah dan guru yang dipalsukan selama pemerintahan kolonial. Saat itu, siswa dan guru menuntut disiplin yang tinggi. Guru tidak dibimbing oleh materi, tetapi oleh cita-cita. Citra guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang tercipta di era Orde Baru sebenarnya dikembangkan di Orde Lama. Kebijakan orde lama dalam pendidikan tinggi adalah mendirikan perguruan tinggi di setiap provinsi.

Pembelajaran sejarah masa orde lama

Indikator	Kurikulum 1947	Kurikulum 1952	Kurikulum 1964
1. posisi	Saat itu fokusnya adalah pada mata pelajaran seni dan pendidikan jasmani yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara.	pelajaran sejarah termasuk dalam kelompok ilmu sosial (IPS) bersama dengan ilmu bumi.	+ Topik-topik dibagi menjadi hanya lima kelompok penelitian: moral, kecerdasan, kemampuan emosional atau artistik, dan kemampuan fisik. + Oleh karena itu, mata pelajaran sejarah termasuk dalam kategori kecerdasan (pengetahuan).
2. materi	Tema terkait kasus dan kehidupan sehari-hari serta lebih fokus kepada Pelajaran seni dan Pendidikan secara fisik	Materi sejarah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan pada diri murid-murid	+ Sesuai dengan pedoman pendidikan nasional Pemerintah Soekarno dalam mendukung politik dalam dan luar negeri. + Materi indoktrinasi dikumpulkan dari berbagai teks pidato Presiden Soekarno yang juga sesuai dengan Manifesto UUD 1959.
3. tujuan	Menanamkan semangat patriotisme yang bertujuan untuk mengabdikan jiwa kemerdekaan dan semangat generasi muda dengan keberanian mengurus kemerdekaan Indonesia.	+ Menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi penerus bangsa + Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mengabdikan dan tidak malu terhadap budaya bangsanya sendiri.	Mewujudkan masyarakat yang kental akan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan pada masa orde baru

Pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan pada masa Orde Baru menemui banyak kendala, karena pendidikan Orde Baru mengedepankan pandangan hidup yang “menyatu”, sehingga memadatkan kemajuan pendidikan. EBANAS dan UMPTN merupakan pilihan yang menjadi unit intelektual mahasiswa. Pemerataan pendidikan tidak dapat diwujudkan dalam pendidikan Orde Baru karena faktor dominan dan submisif dalam sistem pendidikan Orde Baru masih sangat kuat. Saat itu, beban mata kuliah yang besar dan berat dibebankan kepada mahasiswa tanpa mempertimbangkan keterbatasan berbagi minat dengan faktor kurikulum lain agar peka terhadap lingkungan. Beberapa hal negatif lain yang muncul pada masa ini adalah, pertama, bahan ajar yang ditakdirkan menjadi pekerja mempengaruhi hilangnya eksistensi orang-orang yang hidup dengan ide-ide pikirannya (non-humanizing people). Kedua, orang-orang yang lincah dan peka sosial berpendidikan, dan banyak anak muda yang berpikiran positif. Ketiga, hilangnya kebebasan berkomentar. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Suharto membayangkan motonya sebagai "membangun manusia Indonesia yang sempurna dan warga negara Indonesia".

Tujuan dari semua pendidikan pada masa itu adalah untuk memenuhi keinginan penguasa, khususnya mengenai pembangunan nasional. Pelajar dibesarkan sebagai pelajar untuk menjadi manusia “pekerja” yang kemudian berperan sebagai instrumen penguasa untuk menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan tidak melayani untuk menopang orang, tetapi untuk menggunakan kecerdasan mereka untuk kepentingan otoritas saat itu. Yang lebih miris dari kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru adalah sistem pendidikannya. Itu adalah sistem yang memaksakan ide-ide pemerintahan Orde Baru ke dalam pikiran anak-anak. Selain itu, pembagian P4 yang berisi poin-poin hafalan Pancasila harus dipelajari mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Proses indoktrinasi ini tidak hanya membawa gagasan Orde Baru, tetapi juga sistem pendidikan Orde Baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik yang bernilai baik maupun yang bernilai buruk. Saat kami memahami orde baru, kami khawatir apakah kami akan maju. Oleh karena itu, pendidikan pada masa Orde Baru tidak bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi lebih mengutamakan orientasi politik agar seluruh rakyat selalu menaati semua arahan pemerintah. Ketika keputusan dewan adalah keputusan yang adil dan tidak boleh dilanggar. Ini adalah doktrin Orde Baru dalam sistem pendidikan kita. Indoktrinasi era Soeharto diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebuah pendidikan di mana kebebasan berpikir harus diutamakan. Pendidikan pada saat itu terfokus pada pengembangan militerisme agresif yang sesuai dengan tuntutan hidup di lingkungan Perang Dingin. Semuanya serba kaku dan bekerja dalam sistem otoriter.

Kurikulum Pendidikan Orde Baru

Indikator	Kurikulum 1968	Kurikulum 1975	Kurikulum 1984	Kurikulum 1994
1. posisi	Bergabung dengan pendidikan kewarganegaraan	ilmu bumi dan sejarah digabung dan dikenal dengan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).	Mata pelajaran sejarah terbagi dalam dua bagian: Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia. Mata pelajaran PSPB (pendidikan sejarah perjuangan bangsa)	Berubah nama menjadi Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Mata pelajaran PSPB dihapuskan
2. Materi	anti komunisme, anti Soekarno, anti Demokrasi Liberal dan anti Demokrasi Terpimpin.	Terkait dengan pembinaan moral Pancasila	Lebih menekankan konsep dan keterkaitan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa lainnya. Seputar perjuangan bangsa mulai dari proklamasi hingga era pengisian kemerdekaan	Difokuskan pada perjalanan hidup masyarakat masa lampau hingga sekarang, nasional maupun dunia
3. Tujuan	Memperkuat legitimasi kekuasaan dan menunjukkan keberhasilan orde baru	Agar peserta didik memiliki karakter dan siap dalam menghadapi tantangan global	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik • Tujuan PSPB untuk menanamkan nilai-nilai rela berkorban, persatuan, kerjasama, saling menghargai dan bangga terhadap tanah air 	Memahami pengetahuan tentang sejarah sehingga dapat menumbuh-kembangkan jati diri bangsa dan wawasan antar bangsa

Pendidikan pada masa pergerakan nasional

Sejak Kebangkitan Nasional (1908), perjuangan rakyat Indonesia diperjuangkan melewati berbagai partai & organisasi serta melalui jalur politik, ekonomi, & sosial budaya praktis. dan terutama melalui pendidikan. Melihat karakteristik pendidikan yang diselenggarakan oleh atasan Belanda yang tidak meyakini Indonesia bisa cerdas, mandiri, bersatu dan mandiri, maka gerakan tersebut semakin memahami bahwa pendidikan nasional harus segera masuk dalam programnya. dari pertempuran. Cita-cita gerakan sebagai pelopor pendidikan nasional yang dipupuk dengan kemandirian dan pendidikan sudah jelas. Hampir setiap organisasi bisnis nasional memasukkan dan melaksanakan pembinaan dalam anggaran dasar dan/atau program kerjanya. I Djumhur dan H. Danasuparta (1976) mengemukakan bahwa setelah tahun 1900 perusahaan swasta sangat kuat di bidang pendidikan. Untuk mengubah situasi yang disebabkan oleh kolonialisme, gerakan tersebut memasukkan pendidikan dalam program tempurnya. Saat ini telah berdiri sekolah-sekolah swasta (perguruan tinggi negeri) yang diselenggarakan oleh para perintis kemerdekaan. Kebijakan Pendidikan dilaksanakan oleh kaum pergerakan antara lain :

R.A Kartini, JL. Maslah dewi Sartika, dan Rohanna Kudus

Meski tinggal di pelosok, R.A. Kartini, Jl. Masalah Dewi Sartika dan Rohana Kuddus relatif sama. Mereka melihat ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, yang menghambat perempuan untuk maju karena praktik-praktik pada masa itu. Oleh karena itu, baik R.A. Kartin, Dewi Sartika dan Rohana Kudus memiliki cita-cita yang relatif sama, yaitu keinginan untuk bebas, menyendiri dan membebaskan perempuan (gadis) Indonesia lainnya dari ketertinggalan dan keterikatan adat istiadat. Masing-masing berjuang memperjuangkan emansipasi wanita untuk meningkatkan status dan tingkat kemajuan wanita di bidang pendidikan.

Budi Utomo

Pada tahun 1908, Budi Utomo menegaskan dalam kongres pertamanya (3-4 Oktober 1908) bahwa tujuan perkumpulan adalah pemerataan pembangunan negara dan rakyat Indonesia, terutama melalui peningkatan pendidikan, pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. teknologi dan budaya. (a) Muhammadiyah, 18 Nopember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah mendirikan sekolah sendiri, yang didirikan untuk memberi pendidikan menurut masyarakat Indonesia. Kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri harus dipenuhi oleh Realisasi Masyarakat Islam yang menerapkan ajaran Alquran dan Hadits masing-masing guru Rosululloh. Landasan/asas dan tujuan pendidikan. Pelatihan Muhammadiyah berlandaskan dan dibimbing oleh Islam Kepada Alquran dan Hadits. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah membentuk populasi Muslim berakhlak mulia, percaya diri dan suka menolong kepada masyarakat. Sebagai seorang Muslim Anda harus memiliki sifat-sifat berikut: Anda memiliki jiwa tauhid yang murni; pelayanan ibadah kepada Tuhan; Berbakti kepada orang tua dan baik kerabatnya; memiliki karakter yang mulia dan halus perasaannya; sadar dan posesif akuisisi; dan mampu memimpin keluarga dan masyarakat (Abu Ahmadi, 1975); (b) perkumpulan putri mardika dibangun tahun 1912 untuk memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan; (c) TrikoroDharma, Trikoro Dharma didirikan pada tahun 1915 dan setelah itu berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa didirikan di berbagai pelosok tanah air hingga terwujudnya Youth Vacation pada tahun 1928. "Mereka sepakat untuk meningkatkan kesempatan pendidikan dengan membuka sekolah untuk menampung semakin banyak anak Indonesia, untuk memudahkan semua lapisan masyarakat mengikuti kelas dan membuat siswa peka terhadap anak laki-laki Indonesia." (H.A.R. Tilaar, 1995); (d) Perguruan Taman Siswa, Pada awalnya Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) dan kawan-kawan berjuang di jalur politik praktis, setelah tahun 1921 perjuangannya dipusatkan di jalur pendidikan. Dia melakukan ini karena pendidikan pemerintah Belanda mendiskriminasi hak pendidikan dan administrasi negara. Pendidikan sekutu tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat kita, tetapi pada pemenuhan kepentingan sekutu. Isi pendidikan tidak sesuai dengan perkembangan jiwa dan raga masyarakat. Pendidikan kolonial tidak bisa mewujudkan kehidupan bersama, pada akhirnya kita selalu bergantung pada penjajah. Pembelajaran penjajah tidak bisa membuat kita menjadi orang yang mandiri. Menurut Ki Hadjar Dewantara, keadaan (penjajahan) ini tidak akan hilang jika gerakan politik menentanginya. Sebaliknya, justru lebih diutamakan untuk menyebarkan benih-benih kehidupan mandiri di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan pendidikan nasional (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976). Sehubungan dengan hal di atas pada waktu itu. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hadjar Dewantara mendirikan "Institut Onderwijs Taman Siswa Nasional" di Yogyakarta, yang kemudian menjadi "Universitas Nasional Taman Siswa"

Pendidikan Pada Masa Reformasi

Ketika Suharto lengser dari kursi kepresidenan, pemerintah hanya fokus pada urusan administrasi. Ini berarti menyelesaikan masalah politik dan ekonomi yang paling diperhatikan pemerintah, dan mengubah bidang-bidang yang kurang penting di masa-masa awal reformasi, seperti pendidikan. Perubahan politik dari Orde Baru ke Reformasi mengubah struktur negara Indonesia, misalnya dalam pendidikan, khususnya kurikulum sejarah. Perubahan arah dan penulisan sejarah pada masa reformasi juga berimbas pada materi sejarah dalam kurikulum yang disiapkan untuk siswa.

Pendidikan Pada Masa Reformasi

Indikator	Kurikulum 2004	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
1. Posisi	Pembelajaran sejarah berdiri sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • SMP masuk dalam kategori IPS bersama dengan mata pelajaran sosiologi, geografi, dan ekonomi. • SMA: mata pelajaran sejarah berdiri sendiri yang sama dengan mata pelajaran lain 	Menjadi posisi terhormat dibanding kurikulum sebelumnya. terbukti jam pelajaran sejarah lebih banyak dibanding mata pelajaran lain. Sejarah untuk SMA terbagi dua, yakni sejarah sebagai mata pelajaran wajib, dan sejarah sebagai mata pelajaran penunjang.
2. Materi	Seperti peristiwa sejarah. Dalam kurikulum 2004, buku-buku sejarah jarang terbit karena SKKD tidak banyak mencatat fakta perjalanan bangsa Indonesia	Masalah-masalah sosial kontemporer yang sedang dihadapi oleh para peserta didik atau bisa diimpikan materi sejarah dalam kurikulum KTSP berfokus pada sejarah lokal yang relevan dengan persoalan setempat	Berbicara berbagai macam peristiwa. <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah wajib: berbicara seputar sejarah keindonesian. • Sejarah penunjang: berbicara mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa sejarah dunia dan kaitannya dengan Indonesia
3. Tujuan	Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal	Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik.	Menekankan pada pengenalan peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya dengan harapan peserta didik tidak tercabut dari akar budayanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan pada Zaman Islam

Barat mengontrol dan memonopoli kekuatan komersial, ekonomi dan militer; Sains Islam, yang pernah dalam kejayaannya, mengalami stagnasi, dan lahirnya lembaga-lembaga yang penuh bid'ah dan takhayul; Fatalisme semakin menyebar, membuat dunia Muslim semakin terbelakang dan stagnan. Kondisi demikian telah menyadarkan para pemimpin umat Islam akan “penyakit” umat Islam dalam segala aspek kehidupannya, baik itu agama, politik, budaya, ekonomi dan lain-lain.

Pendidikan Masa Kerajaan Islam

Kebutuhan pendidikan masyarakat muslim mendorong masyarakat muslim Indonesia untuk menerima dan Konversi lembaga keagamaan dan sosial yang ada menjadi lembaga Pendidikan Islam di Indonesia.

Pendidikan pada Masa Portugis

Pendidikan pada masa portugis memiliki tujuan pertama yaitu menyebarkan agama mereka (katolik) menggunakan metode Pendidikan dan pengajaran. Pada masa portugis ini terkendala Bahasa didalam system pendidikannya.

Pendidikan pada zaman Belanda

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi barat di Hindia Belanda, pemerintah Belanda menyelenggarakan pelatihan untuk penduduk asli, yang berencana untuk mempromosikan tenaga kerja yang berpengalaman dan mampu dalam perdagangan dan bidang lainnya. Lahirnya sistem pendidikan tidak hanya karena proses perencanaan, tetapi juga tahapan dan proses yang sangat panjang, serta didorong oleh kebutuhan yang menyangkut beberapa aspek penting pemerintahan Belanda saat itu.

Pendidikan pada Zaman Jepang

Ada dua program lainnya yaitu Shoto Chu Gakko (SMA) dengan masa studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (SMA) juga dengan masa studi 3 tahun. Sistem pendidikan di atas merupakan tanda kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama dengan berdirinya lembaga pendidikan seperti madrasah dan pondok pesantren di daerah terpencil. Di sisi lain, pemerintah Jepang juga menyelenggarakan kursus sekolah dan pelatihan bagi calon guru. Juga kebijakan Pendidikan Tentara untuk orang Indonesia

seperti Heiho/Organisasi Militer dan PETA bahwa Jepang membentuk para Pemuda. Kebijakan Kurikulum Pemerintah Jepang Pada masa pemerintahan Jepang. Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang memberikan dukungan dana kepada sekolah-sekolah, pondok pesantren, dan madrasah agar dapat dengan leluasa menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan kurikulum

Pendidikan pada Masa Orde Lama

Dalam sistem pendidikan saat ini dari tahun 1945 hingga 1950, jenjang pendidikan terendah di Indonesia setelah kemerdekaan disebut sekolah umum (SR) lama. Saat itu Jawa memiliki pendidikan tinggi yang berkualitas seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada dan UNAIR, sedangkan kualitas pendidikan tinggi di provinsi menurun karena kurangnya keterampilan dan terbatasnya sarana dan prasarana. Secara umum, pembentukan Orde Lama sebagai bentuk interpretasi pasca kemerdekaan cukup pada masa Soekarno untuk menciptakan ruang bebas bagi pembentukan pemerintahan berdasarkan sosialisme, yang menjadi acuan utama perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. . . untuk pengembangan. dan kesuksesan masa depan bangsa Indonesia.

Pendidikan Masa Orde Baru

Pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan pada masa Orde Baru menemui banyak kendala, karena pendidikan Orde Baru mengedepankan pandangan hidup yang “menyatu”, sehingga memadamkan kemajuan pendidikan. Pemerataan pendidikan tidak dapat diwujudkan dalam pendidikan Orde Baru karena faktor dominan dan submisif dalam sistem pendidikan Orde Baru masih sangat kuat. selalu menaati semua arahan pemerintah.

Pendidikan pada Masa Pergerakan Nasional

Pada masa pergerakan nasional pemerintah belanda meyakini Indonesia tanah jajahnya tidak mungkin dapat berkembang dalam system Pendidikan maka dari itu tokoh-tokoh seperti R.A Kartini dll yang memiliki kesadaran kan Pendidikan dan kemajuan bangsa nya memilih berjuang dalam sector Pendidikan guna mencerdaskan bangsanya.

Pendidikan pada Masa Reformasi

Perubahan arah dan penulisan sejarah pada masa reformasi juga berimbas pada materi sejarah dalam kurikulum yang disiapkan untuk siswa. Kurikulum 2004, yang merupakan kurikulum pertama yang diperkenalkan pada masa reformasi, juga dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan naskah jurnal ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada Pro, Dr.Maftukhin, M.Ag, selaku rector UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah memberikan fasilitas Pendidikan berupa Gedung perpustakaan untuki mencari sumber rujukan melalui buku; Prof, Dr Hj. Binti Maunah, M.Pd.I selaku dekan fakultas dan ilmu keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar Pendidikan yang telah membimbing dan memerikan ilmu serta pengarahan terkait pembelajaran, sehingga naskah ini dapat terselesaikan; civitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan semua pihak yang membantu menyelesaikan naskah jurnal ini, sehingga dapat terselesaikan denga baik dan tepat waktu sesuai tempo yang telah ditentukan.

REFERENSI

- Handito, T., & Stiawan, B. (2023). *Petuah Bijak Ki Hadjar Dewantara dalam Laku Pendidikan Kumpulan Essai Reflektif dan Praktik Baik*. Deepublish.
- Hudaidah, H., & Karwana, M. A. P. (2022). PENDIDIKAN DI INDONESIA MASA PENDUDUKAN JEPANG. *Danadyaksa Historica*, 1(2), 97–104.

- Masyhudi, F. (2023). Kebijakan Pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi Terhadap Pendidikan Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 291–298.
- Meinarno, E. A., Widiyanto, B., & Halida, R. (2024). *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat: Pendekatan Antropologi dan Sosiologi*. Penerbit Salemba.
- Muthoharoh, M. (2021). Historis Pendidikan Islam serta Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Tasyri: Jurnal Tarbiyah-Syariah-Islamiah*, 28(1), 1–14.
- Riska, R., & Hudaidah, H. (2021). Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 824–829.
- Saifudin, A. (2022). Sejarah Dan Paradigma Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia. *JIEEM: Journal Of Islamic Education and Management*, 2(2), 1–13.
- Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164–177.
- Saputra, F. (2021). Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam di Indonesia. *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(1), 98–108.
- Sholeha, S. (2021). *PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro.
- Stroomberg, J. (2018). *Hindia Belanda 1930*. IRCiSoD.
- Yusuf Perdana, Y. P., & Rinaldo, A. P. (2022). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Penerbit Lakeisha.